

Studi Tentang Perubahan Orientasi Jamaah Pengajian Menjadi Radikal Di Kota Bima Nusa Tenggara Barat

Syarif Ahmad¹, Firdaus², Akhyar³

¹Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Mbojo Bima

²Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Mbojo Bima

³Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Mbojo Bima

Email: [syarif@Universitasmbojobima.ac.id](mailto:syarif@universitasmbojobima.ac.id)

Abstract. *The shift in orientation of religious study groups in Bima city toward radical ideology occurs through various stages, beginning with intensive interactions with groups that have already been exposed to radicalism. The factors underlying this transformation include ideological, socio-economic, and political aspects, as well as dissatisfaction with the existing system. Research findings indicate that radicalization often originates from seemingly ordinary religious discussions, which gradually lead to more exclusive and intolerant understandings. Social media also plays a role in accelerating the spread of this ideology by presenting narratives that appeal to vulnerable groups. Therefore, this study emphasizes the importance of public awareness in recognizing early signs of cognitive shifts toward radicalism. The government and relevant stakeholders must actively address radicalism through a comprehensive approach, encompassing education, economic empowerment, and fair and inclusive policies. With the right strategy, society is expected to become more resilient against radical influences and capable of fostering a harmonious and tolerant social environment in Bima City.*

Keywords: *Radicalization; Socio-Economic Factors; Orientation Shift.*

Abstrak.

Perubahan orientasi jamaah pengajian di Kota Bima menuju paham radikal terjadi melalui berbagai tahapan yang dimulai dari interaksi intensif dengan kelompok yang sudah lebih dahulu terpapar radikalisme. Faktor-faktor yang melatarbelakangi perubahan ini meliputi aspek ideologis, sosial-ekonomi, politik, dan kekecewaan terhadap sistem yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa radikalisasi sering kali bermula dari diskusi keagamaan yang tampak biasa, namun secara perlahan mengarah pada pemahaman yang lebih eksklusif dan intoleran. Media sosial turut berperan dalam mempercepat penyebaran paham ini dengan menyajikan narasi yang menarik bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam mengenali tanda-tanda awal perubahan pemikiran yang mengarah pada radikalisme. Pemerintah dan pemangku kepentingan harus berperan aktif dalam menangani radikalisme dengan pendekatan yang komprehensif, mulai dari pendidikan, pemberdayaan ekonomi, hingga kebijakan yang adil dan inklusif. Dengan strategi yang tepat, diharapkan masyarakat dapat lebih tangguh dalam menghadapi pengaruh radikalisme dan mampu membangun kehidupan sosial yang harmonis serta toleran di Kota Bima.

Kata Kunci: Radikalisasi; Faktor Sosial-Ekonomi; Perubahan Orientasi.

Received Sept 30, 2024; Revised Oct 02, 2024; Accepted Dec 02, 2024

*Syarif ahmad, e-mail address: syarif@universitasmbojobima.ac.id

PENDAHULUAN

Penyebaran Islam di Nusantara oleh para wali songo, situasi damai dan kondisi toleran terjadi melalui interaksi keragaman budaya kehidupan lokal, bahkan pada masanya islam dapat hidup damai berdampingan dengan umat lain dan kepercayaan lain (Asrori 2015). Pada masa pasca kemerdekaan RI separatisme mengatasnamakan Islam mulai terlihat melalui gerakan pemberontakan yang terjadi seperti Kartosuwiryo tahun 1950 dengan nama DI/TII. Belakangan ini karena faktor kontigensi yang ada bermunculanlah sekte, aliran, dan mazhab baru yang mengatasnamakan Islam berkembang pesat sesuai dengan latar belakang kebudayaan dan kondisi lingkungan pendukung didaerah penganutnya (Asrori 2015). Pasca reformasi 98 yang ditandai dengan bebasnya filter demokrasi dan kebebasan berpendapat lebih didahulukan dibanding penegakan hukum, maka radikalisme telah menjadi lahan subur ditandai munculnya kelompok paham baru termasuk paham agama mengatasnamakan Islam radikal.

Paham radikalisme dikalangan umat beragama islam seringkali disamakan dengan paham keagamaan padahal berbeda konteks dan tujuan dari apa yang diajarkan islam, pencetus radikalisme lahir dari berbagai kontigensi, mulai dari permasalahan ekonomi, kondisi politik, ketidakadilan sosial dan hukum dan isu marjinal pada kehidupan masyarakat. Pola organisasi paham radikal bervariasi mulai dari gerakan moral ideologi hingga militan bergaya militer. Organisasi ini memiliki tujuannya, tetapi yang menjadi penyamaan tujuan adalah mengganti kekuasaan negara dengan cara menggulingkan pemerintahan dan politik yang sah.

Keruntuhan kekuasaan Orde Baru yang ditandai dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei tahun 1998, menjadi titik balik kemunculan gerakan Islam Politik di Indonesia dengan mengusung tema kembali kepada Piagam Jakarta. Selama rezim Orde Baru, terjadi sakralisasi Undang-Undang Dasar 1945 dan pasca Orde Baru, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) mulai dibuka dan diberi ruang untuk dilakukan amandemen, sebagaimana tujuan utama dari gerakan reformasi, yaitu klaim penyempurnaan terhadap konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Amandemen UUD 1945 yang dilakukan sebanyak empat kali, dalam masa waktu tahun 1999 - 2002 melalui ketetapan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR, yaitu: *Pertama*, perubahan pada Sidang Umum MPR tanggal 14-21 Oktober 1999. *Kedua*, Perubahan pada Sidang Tahunan MPR RI tanggal 7-19 Agustus 2000. *Ketiga*, Perubahan pada Sidang tahunan MPR tanggal 1-9 November 2001. *Keempat*, perubahan pada Sidang Tahunan MPR RI tanggal 1-11 Agustus 2002. Tuntutan kelompok Islam Politik tentang kembali kepada Piagam Jakarta, mengisi ruang-ruang diskursus nasional.

Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi jaminan konstitusional, bukan saja melahirkan sejumlah partai politik (Parpol) yang berkompetisi pada pemilihan umum 1999 sejumlah 48 Parpol, tetapi juga telah mendorong lahir dan tumbuhnya sejumlah organisasi masyarakat (ormas) dengan berbagai kepentingan dan identitas. Inilah fase dimana euforia kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan pendapat berada pada “puncak keemasan”.

Suasana kebatinan tentang kebebasan dan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan, sejumlah orang yang sebelumnya (sebelum tahun 1998), memilih “diam di bawah tanah”, mulai menampilkan dirinya sebagai sosok-sosok individu dengan bungkusan identitas

keagamaan. Maka munculah berbagai ormas-ormas Islam, sebagai fenomena kebangkitan kembali Islam politik di Indonesia, yang sempat tenggelam melalui kebijakan asas tunggal orde baru pada tahun 1985. Kebangkitan ormas-ormas beraliran Islam politik di Indonesia, membenarkan pendapat Ahmad Suhelmi, bahwa ideologi politik yang bersumber dari ajaran agama-agama klasik seperti Islam, dalam suatu kurun sejarah tertentu, karena ditindas penguasa politik bisa saja ideologi itu tenggelam, tapi suatu saat ia akan bangkit kembali manakala situasinya kondusif.

Beberapa ormas-ormas Islam yang muncul sebagai implikasi amandemen UUD tahun 1945 dengan mengekspresikan kebebasan dan kemerdekaan berpendapat secara lisan dan tulisan, melalui tuntutan penegakan syariat Islam menjadi orientasi politik dari beberapa Ormas Islam tersebut. Orientasi politik sejumlah orams-oramas yang lahir dan tumbuh pasca orde baru tersebut, berbeda dengan orientasi Ormas-ormas yang sudah ada sebelumnya, seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis) dan sebagainya, dengan gagasan Islam kultural.

Ormas-ormas Islam yang menampakan dirinya pasca orde baru tahun 1998, seperti; Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), Majelis Mujahidin Indoensia (IMM), Hizbut Tharir (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad dan Laskar Jundullah. Ormas-ormas Islam politik tersebut, terhimpun dalam sebuah wadah komunikasi atau yang dikenal dengan Forum Umat Islam (FUI) dengan menjadikan agenda formalisasi Islam ke dalam konstitusi negara. Ormas-ormas Islam yang berorientasi pada gerakan politik dapat ditemukan dari tuntutan dan agenda politik yang mereka perjuangkan sepanjang proses amandemen UUD 1945 pada tahun 1999 - 2002, yaitu formalisasi Islam ke dalam konstitusi negara. Meskipun agenda oramas-oramas Islam tersebut, gagal menjadikan Islam secara formal masuk dalam konstitusi negara, namun gagasan formalisasi Islam tersebut telah menjadi suatu “kesepakatan politik” dari kelompok Islam ini atau terkonsolidasi secara gagasan tentang penting dan perlunya pengintegrasian Islam di dalam negara secara formal sebagai jalan keluar atas kondisi kemerosotan moral umat Islam.

Keberadaan ormas-ormas keagamaan tersebut, menjadi momentum terjadinya “pembibitan” dan penyebaran gagasan tentang formalisasi Islam di seluruh wilayah Republik Indonesia. Hal tersebut tergambar dari sebaran aktivis-aktivis Islam, tidak lagi terkonsentrasi pada pusat kekuasaan nasional (Jakarta) dengan tuntutan formalisasi Islam di dalam UUD 1945. Namun mulai tumbuh dan berkembang pada beberapa daerah di Indonesia dalam bentuk penerapan syariat Islam melalui Perda, seperti terbentuknya Komite Persiapan Pemberlakuan Syariat Islam (KPPSI) di Sulawesi Selatan dan pembentukan beberapa cabang-cabang ormas Islam di beberapa daerah di Indonesia dengan agenda formalisasi Islam pada Perda.

Beberapa daerah yang subur bagi bersemainya aktivis-aktivis Islam politik, seperti di wilayah Jawa Barat, Aceh dan Sulawesi Selatan, dengan model orientasi formalisme syariat Islam, memiliki akar sejarah yang kuat yang disertai dengan ikatan-ikatan primordial dengan Darul Islam/ Indonesia-Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Namun sebaran benih-benih ideologi Islam politik juga mengalami proses perkembangan yang signifikan di beberapa daerah di luar sejarah kekuasaan politik DI/TII, seperti di wilayah Solo, Poso dan Bima.

Di antara banyak tempat di negara ini yang menjadi tempat munculnya kelompok ekstremis kekerasan atau disebut sebagai gerakan radikalisme adalah Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara historis, Bima memiliki sejarah panjang aktivitas radikal, aksi teroris yang berulang kali dilakukan, dan, yang paling penting, komunitas radikal

yang sporadis namun kuat. Bima sering disebut sebagai tempat rekrutmen dan pembibitan kaum radikal dan menjadi salah satu tempat berlindung yang aman bagi para buronan teroris.

Perkembangan Jamaah pengajian di Kota Bima tercermin dari berkembangnya jumlah aktivis-aktivis Islam yang terhimpun dalam Jamaah Pengajian Keagamaan dan tempat-tempat Jamaah Pengajian Keagamaan tersebut lahir kader-kader Islam dalam memperjuangkan formalisasi Islam dan oleh negara disebut sebagai Islam radikal. Meskipun secara umum, tidak semua anggota jamaah pengajian di Kota Bima menjadi Islam Politik dan atau berkaitan dengan radikalisme dan terorisme. Namun, beberapa fakta menunjukkan, bahwa ada beberapa dari anggota Jamaah Pengajian Keagamaan di Bima yang ditangkap, diadili, divonis bersalah sebagai terpidana terorisme.

Perubahan sikap dan orientasi dari anggota Jamaah Pengajian Keagamaan di Kota Bima menjadi fokus dalam studi ini, dengan pertimbangan bahwa pelaku yang ditangkap, ditembak dan diadili serta yang telah divonis bersalah oleh pengadilan dengan menggunakan Undang-Undang Anti Terorisme⁷ adalah mereka yang memiliki latar belakang sebagai anggota Jamaah Pengajian di Bima. Perubahan sikap dan orientasi dari anggota Jamaah Pengajian yang semula sebagai Jamaah Pengajian yang bersifat keagamaan dan dalam perkembangannya menjadi anggota Jamaah yang bersifat politik dan disebut sebagai Islam radikal atau yang terlibat dalam jaringan aksi-aksi terorisme di Indonesia.

Pergeseran orientasi Jamaah Pengajian yang semula berorientasi pada kajian keagamaan menjadi Islam politik pada kalangan anggota Jamaah Pengajian di Kota Bima, memberi kesan dan pesan yang kuat tentang bermetamorfosinya anggota Jamaah Pengajian yang bersifat keagamaan, menjadi Jamaah Pengajian yang bersifat radikal dan menjadi teroris. Mencermati fenomena perubahan-perubahan Jamaah Pengajian tersebut, menunjukkan ada modifikasi ideologi Islam politik dari ketaatan keagamaan (baca: Islam), menjadi ketaatan terhadap agenda Islam Politik (formalisasi Islam) yang dilakukan secara radikal dan ekstrim dengan memilih jalan kekerasan untuk mencapai tujuan.

Keberadaan Zamaah Ansharut Tauhid (ZAT) dan Zamaah Ansharut Daulah (ZAD), secara historis kedua kelompok tersebut memiliki keterkaitan dengan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Meskipun pada perkembangannya, ZAT dan ZAD adalah organisasi pecahan dari MMI. Perpecahan secara internal MMI yang membentuk ZAT dan ZAD,⁹ dan Tauhid wal Jihad (TWJ) berada di Kota Bima. Secara organisasi ZAT memiliki kantor cabang di Bima (Kampung Melayu - Kota Bima), hal ini berbeda dengan JAD dan TWJ tidak memperlihatkan adanya sekertariat atau apapun yang menunjukkan identitas organisasi tersebut.

Namun JAT, JAD dan TWJ, secara ideologi memiliki hubungan dengan beberapa kelompok yang menyelenggarakan pengajian di Bima.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mencari fakta dengan interpretasi yang faktual dan akurat tentang berbagai fenomena yang diselidiki. Penelitian kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor, menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu serta perilaku yang diamati. Sanapiah Faisal menyatakan bahwa penelitian ini berfungsi sebagai eksplorasi dan klarifikasi terhadap fenomena sosial dengan mendeskripsikan variabel yang relevan. Studi ini meneliti perubahan orientasi Jamaah Pengajian Keagamaan menjadi radikal di Bima, yang

terkait dengan perubahan pemikiran dan gerakan para jamaah. Untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana perubahan ini terjadi dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya, metode kualitatif digunakan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan Focus Group Discussion (FGD). Observasi dilakukan dengan pendekatan participant as observer untuk mengamati gejala perubahan tersebut. Wawancara melibatkan pimpinan jamaah, mantan narapidana terorisme, anggota jamaah, serta tokoh agama seperti Ketua MUI, Kepala Departemen Agama, Ketua NU, dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bima. Dokumentasi mencakup analisis terhadap dokumen, arsip, modul pengajian, serta laporan penelitian sebelumnya untuk memahami perubahan ini secara historis. Data yang diperoleh dikategorikan sebagai data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara induktif untuk menemukan pola, model, atau tema tertentu. Proses analisis dilakukan sejak awal hingga akhir penelitian dengan tujuan menggambarkan perubahan pemikiran dan aktivitas Jamaah Pengajian Keagamaan menjadi lebih radikal secara objektif dan tidak diskriminatif. Dengan pendekatan ini, studi diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai transformasi sosial yang terjadi dalam kelompok keagamaan di Kota Bima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan dan proses perubahan dari Jamaah Pengajian keagamaan di Kota Bima menjadi Jamaah Pengajian Radikal

Di Kota Bima, fenomena radikalisme telah menjadi ancaman serius, tidak hanya bagi masyarakat umum tetapi juga bagi para radikal sendiri yang kesadarannya semakin menipis. Radikalisme sering disebut sebagai ibu kandung terorisme, karena pemahaman yang sempit terhadap ajaran agama dapat melahirkan gerakan ekstrem yang menghalalkan segala cara, termasuk kekerasan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan agama. Pergeseran orientasi jamaah pengajian di Kota Bima berkaitan erat dengan aktivitas sosial dan politik di daerah tersebut. Banyak individu yang merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah, kemudian memanfaatkan pengajian sebagai wadah untuk menyebarkan narasi kebencian terhadap pemerintah. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya jumlah jamaah pengajian yang secara perlahan mengadopsi pandangan radikal.

Proses menjadi radikal di Kota Bima umumnya dimulai dari diskusi kecil di lingkungan tempat tinggal, yang kemudian berkembang menjadi keinginan untuk mendalami agama melalui kelompok pengajian tertentu. Jamaah pengajian di Kota Bima memiliki rutinitas terjadwal dalam melakukan kajian keagamaan, yang menjadi daya tarik bagi masyarakat yang ingin mendalami agama lebih dalam. Kelompok ini juga melakukan propaganda melalui selebaran dan pamflet yang disebar di berbagai masjid, sehingga menimbulkan rasa penasaran di kalangan masyarakat untuk mengikuti kajian tersebut. Akibatnya, banyak individu yang awalnya hanya ingin mencari ilmu agama, namun tanpa disadari akhirnya terseret dalam arus pemikiran radikal yang berkembang dalam kelompok tersebut.

Pendapat seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) bernama Khaerunissa menggambarkan bagaimana seseorang dapat terpapar radikalisme. Ia bercerita bahwa

salah satu anggota keluarganya, yang juga seorang ASN, mulai berkomunikasi dengan para pendakwah keliling. Awalnya, interaksi tersebut tampak wajar, tetapi seiring waktu, anggota keluarganya itu mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai ASN dan mengeluarkan anak-anaknya dari sekolah formal untuk dipindahkan ke sekolah milik kelompok pengajian tertentu. Dalam beberapa tahun, interaksi sosialnya semakin berkurang, bahkan komunikasi dengan keluarga dekatnya menjadi terbatas. Istrinya pun tidak lagi berkunjung untuk bersilaturahmi dengan alasan mengikuti pengajian. Kisah ini menjadi contoh nyata bagaimana interaksi dengan kelompok pengajian tertentu dapat menyebabkan seseorang bergeser orientasi dan akhirnya mengadopsi paham radikal.

Fakta ini menunjukkan bahwa tahapan awal pergeseran orientasi seseorang atau kelompok menuju radikalisme dimulai dari intensitas interaksi mereka dengan jamaah pengajian yang telah lebih dulu terpapar pemahaman radikal. Interaksi ini sering kali terjadi tanpa disadari, karena dimulai dari diskusi agama yang pada awalnya tampak tidak bermasalah. Namun, perlahan-lahan, pemahaman mereka mulai bergeser seiring dengan doktrin yang mereka terima. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat sangat penting dalam mengenali tanda-tanda awal perubahan pemikiran yang mengarah pada radikalisme.

Radikalisme yang berkembang di Kota Bima cukup mengkhawatirkan karena dapat memicu tindakan kekerasan yang berakar dari berbagai faktor. Tindakan main hakim sendiri, anarkisme dalam menyikapi perbedaan, dan aksi kekerasan dalam menyampaikan pendapat adalah fenomena yang masih sering terjadi di masyarakat. Berbagai survei menunjukkan bahwa potensi radikalisme di Indonesia masih berada pada angka yang patut diwaspadai. Hal ini semakin diperparah dengan adanya media sosial yang digunakan sebagai sarana propaganda oleh kelompok radikal. Mereka menyebarkan narasi kebencian, teori konspirasi, serta informasi yang memanipulasi fakta untuk menarik simpati masyarakat dan merekrut anggota baru.

Menurut Akbar, seorang peserta diskusi mengenai radikalisme, terdapat tiga tahapan utama dalam doktrin radikal. Tahap pertama adalah Iman, di mana seseorang mulai menerima ideologi tertentu yang sering kali didasarkan pada tafsir agama yang sempit. Tahap kedua adalah Hijrah, yang ditandai dengan perubahan gaya hidup dan pemutusan hubungan dengan lingkungan sosial yang dianggap tidak sejalan dengan ideologi mereka. Tahap ketiga adalah Jihad, yang merupakan puncak dari proses radikalisasi, di mana individu atau kelompok tersebut siap melakukan tindakan ekstrem, termasuk kekerasan, untuk mencapai tujuan ideologis mereka. Paham radikal berkembang di tengah masyarakat ketika ada ketidakadilan sosial, ketimpangan ekonomi, serta penyimpangan dalam pemahaman ajaran agama.

Dalam menangani radikalisme, peran negara dan pemangku kepentingan sangat penting. Pemerintah harus hadir dengan cepat dan tanggap dalam meredam konflik yang terjadi atas nama agama dan SARA. Selain itu, jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat harus dijamin agar tidak ada celah bagi kelompok radikal untuk memanfaatkan ketidakpuasan sosial sebagai sarana

perekrutan anggota baru. Pemerintah juga perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila secara konsisten, baik dalam penerapan hukum, pelayanan publik, maupun kebijakan sosial. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa diperlakukan secara adil dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi radikal yang mengatasnamakan keadilan.

Selain intervensi pemerintah, pembinaan mental dan spiritual bagi generasi muda di lembaga pendidikan formal dan nonformal juga menjadi langkah penting dalam menangkal radikalisme. Kurikulum pendidikan harus dirancang untuk menanamkan pemahaman agama yang moderat serta nilai-nilai toleransi dan kebangsaan. Para pendidik juga harus memiliki pemahaman yang cukup tentang radikalisme agar dapat mengidentifikasi dan menangani potensi penyebaran paham ekstrem di lingkungan sekolah. Selain itu, tokoh agama dan masyarakat harus turut serta dalam memberikan pemahaman agama yang benar serta menegaskan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan perdamaian dan kasih sayang, bukan kekerasan dan permusuhan.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi perubahan dari Jamaah Pengajian yang bersifat keagamaan menjadi Radikal.

Faktor Landasan berfikir

Sistem pendidikan yang tidak mengajarkan cara berpikir kritis dan toleransi berpotensi melahirkan sikap radikal. Pendidikan agama yang tekstualis dan doktriner juga berkontribusi pada munculnya pemahaman yang sempit. Kurangnya wawasan kebangsaan dan pemahaman akan keragaman dalam kurikulum pendidikan turut andil dalam menumbuhkan sikap intoleran dan eksklusif. Di Kota Bima, fenomena ini semakin diperparah oleh lingkungan sosial yang turut membentuk cara berpikir individu. Jika seseorang tumbuh dalam lingkungan eksklusif, besar kemungkinan mereka akan mengikuti pola pikir yang sama. Salah satu contoh nyata adalah pergeseran kelompok-kelompok pengajian di Kota Bima yang awalnya kooperatif, tetapi kemudian berubah menjadi eksklusif akibat pengaruh lingkungan. Mereka bahkan menolak sistem pendidikan dan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah, lebih memilih membangun sekolah sendiri yang berlandaskan ajaran kelompok mereka.

Lingkungan belajar sangat berpengaruh terhadap cara berpikir dan bertindak seseorang. Orang yang memiliki tingkat pendidikan rendah cenderung lebih rentan terhadap pemikiran radikal, karena mereka terbatas dalam memahami berbagai perspektif dan lebih mudah menerima ajaran yang sempit. Kurangnya pemahaman kritis terhadap isu-isu agama mendorong terjadinya perubahan orientasi kelompok pengajian di Kota Bima. Peristiwa penangkapan oleh Densus 88 pada tahun 2017 terhadap salah satu anggota pengajian di Kota Bima menjadi bukti nyata bahwa pemahaman radikal bisa tumbuh dan berkembang dalam kelompok yang menutup diri dari interaksi dengan masyarakat luas. Dalam banyak kasus, mereka menolak shalat di masjid umum jika imamnya berasal dari kalangan ASN, karena mereka menganggap bahwa hanya kelompok mereka yang memiliki pemahaman agama yang benar.

Salah satu anggota kelompok pengajian di Penato'i Kota Bima, Sugiono, mengungkapkan bahwa pola belajar yang tidak tepat menjadi salah satu penyebab

utama penyebaran paham radikal. Banyak individu dalam kelompok ini hanya mencari informasi melalui dunia maya atau dari individu yang mereka anggap baik, tanpa mempertimbangkan referensi yang lebih luas. Akibatnya, mereka menafsirkan ayat-ayat agama tanpa pemahaman mendalam dan tidak mau menerima pendapat dari luar kelompok mereka. Sikap ini menjadikan mereka semakin tertutup dan meyakini bahwa apa yang mereka percayai adalah satu-satunya kebenaran. Model transformasi pendidikan yang seperti ini mempercepat penyebaran paham radikal di Kota Bima.

Faktor Sosial-Ekonomi

Selain faktor pendidikan, faktor sosial-ekonomi juga menjadi pemicu tumbuhnya radikalisme di Kota Bima. Kesenjangan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran menciptakan peluang bagi kelompok radikal untuk merekrut anggota baru. Banyak orang miskin yang mudah dipengaruhi oleh janji perubahan nasib yang ditawarkan oleh kelompok radikal. Kelompok pengajian di Kota Bima yang menutup diri dari pemerintah sering kali membangun komunikasi dengan kelompok radikal di luar kota untuk mendapatkan dana pembinaan, yang sering kali diklaim sebagai bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Situasi ini semakin memperkuat pergeseran orientasi mereka ke arah yang lebih eksklusif dan menolak segala bentuk intervensi dari pemerintah.

Ruslan, salah satu warga Kota Bima, mengungkapkan bahwa banyak anak muda di daerahnya telah terpapar paham radikal dan bahkan ada yang pergi berjihad ke luar negeri. Mereka tertarik bergabung dengan kelompok radikal karena dijanjikan gaji dan jaminan finansial untuk keluarga mereka. Sebelum dikirim ke medan jihad, mereka dibina selama bertahun-tahun dengan doktrin agama yang ekstrem serta dilatih keterampilan tertentu. Proses rekrutmen ini semakin diperkuat dengan retorika bahwa mereka sedang berjuang di jalan yang benar dan bahwa pemerintah tidak berpihak pada kepentingan umat Islam. Hal ini menyebabkan banyak anak muda meninggalkan pendidikan formal dan memilih bergabung dengan kelompok yang mereka anggap lebih mewakili perjuangan mereka.

Kelompok pengajian di Kota Bima yang bersikap eksklusif juga tidak mau berkolaborasi dengan pemerintah. Mereka menganggap kebijakan pemerintah tidak adil dan tidak berpihak kepada mereka. Karena sikap eksklusif ini, mereka menolak bantuan dari pemerintah, yang akhirnya menyebabkan mereka kesulitan secara ekonomi. Dalam kondisi ini, kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan tertentu memanfaatkan situasi dengan menawarkan bantuan keuangan. Dengan dalih "membantu umat," kelompok-kelompok ini dengan mudah mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari kelompok pengajian yang tertutup. Dalam jangka panjang, situasi ini semakin memperkuat pola pikir radikal di kalangan jamaah pengajian di Kota Bima.

Selain faktor sosial-ekonomi, faktor politik juga turut berperan dalam perubahan orientasi kelompok pengajian di Kota Bima. Mereka merasa pemerintah tidak berpihak pada kelompok mereka dan justru dianggap sebagai penghalang dalam misi perubahan yang mereka yakini. Bahkan, beberapa kelompok pengajian menyebut pemerintah sebagai "Tagut," sebuah istilah yang digunakan untuk menyatakan bahwa pemerintah telah menyimpang dari ajaran Islam. Ketidakpuasan terhadap sistem politik yang ada membuat mereka mencari alternatif yang lebih ekstrem. Mereka menganggap bahwa demokrasi telah gagal mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, sehingga mereka mulai berpaling kepada ideologi yang lebih radikal.

Sentimen anti-Barat juga menjadi pemicu radikalisme di Kota Bima. Kebijakan luar negeri negara-negara Barat yang dianggap merugikan umat Islam memunculkan ketidakpuasan yang dimanfaatkan oleh kelompok radikal. Wawancara dengan seorang narasumber mengungkapkan bahwa perilaku radikal sering muncul akibat kekecewaan terhadap lembaga negara atau institusi agama yang sudah mapan. Mereka menganggap bahwa pemerintah dan organisasi Islam yang ada tidak cukup progresif dalam menangani masalah sosial dan menerapkan nilai-nilai agama di masyarakat. Akibatnya, mereka mengambil tindakan sendiri dengan melakukan aksi-aksi agresif yang dalam beberapa kasus ekstrem bahkan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Faktor sosial juga menjadi faktor utama dalam penyebaran paham radikal di Kota Bima. Agama sering kali digunakan sebagai inspirasi dan motivasi bagi penganutnya untuk melakukan tindakan tertentu. Paham radikalisme dapat dengan mudah menyebar dengan cara mempengaruhi pola pikir individu yang memiliki pemahaman agama yang sempit. Kelompok pengajian di Kota Bima merekrut anggota baru dengan melakukan profiling individu yang mereka anggap rentan terhadap pengaruh mereka. Mereka mencari orang-orang yang merasa tersisih dari sistem sosial dan ekonomi, kemudian menawarkan mereka identitas baru yang lebih eksklusif dan memberikan mereka tujuan yang dianggap lebih mulia. Dengan pendekatan ini, kelompok radikal terus berkembang dan menjadi ancaman yang harus diwaspadai oleh semua pihak.

KESIMPULAN

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa proses radikalisasi terjadi secara bertahap melalui interaksi intensif dengan kelompok yang telah lebih dahulu terpapar paham radikal. Faktor utama yang melatarbelakangi perubahan ini mencakup aspek ideologis, sosial-ekonomi, politik, dan pendidikan. Sistem pendidikan yang tidak mendorong pemikiran kritis dan toleransi, serta kurikulum agama yang terlalu tekstualis dan doktriner, turut berperan dalam membentuk sikap eksklusif dan intoleran di kalangan jamaah pengajian. Lingkungan sosial yang mendukung pemikiran tertutup semakin mempercepat proses radikalisasi, di mana diskusi keagamaan yang pada awalnya tampak biasa mulai berkembang menjadi doktrin yang lebih ekstrem. Selain itu, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran menciptakan kondisi yang memungkinkan kelompok radikal merekrut anggota baru dengan menawarkan solusi ekonomi dan identitas baru yang lebih eksklusif. Faktor politik juga memainkan peran penting dalam perubahan orientasi ini, di mana ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah mendorong beberapa kelompok pengajian untuk mengadopsi ideologi radikal dan menolak sistem yang ada. Media sosial turut mempercepat penyebaran paham ini dengan menyajikan narasi yang menarik bagi kelompok rentan, memperkuat sentimen anti-pemerintah dan anti-Barat, serta membangun solidaritas di antara kelompok radikal. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif dari pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menangkal radikalisme melalui pendekatan pendidikan yang inklusif, pemberdayaan ekonomi, dan kebijakan sosial yang adil. Dengan strategi yang tepat, diharapkan masyarakat dapat lebih tangguh dalam menghadapi pengaruh

radikalisme serta mampu membangun kehidupan sosial yang harmonis dan toleran di Kota Bima.

REFERENSI

- Ormas-ormas Islam besar *Mainstream* atau arus utama masyarakat Indonesia seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Persatuan Islam (Persis), sudah ada sebelumnya dan tetap eksis selama Orde Baru dengan kebijakan asas tunggal Pancasila pada tahun 1985.
- Ahmad Suhelmi, (pengantar) dalam Al Chaidar, *Pemikiran Proklamator Negara Islam Indonesia SM Kartosoewirjo*. PT. Darul Falah, 1999, hlm. xxiii
- As Hornby, *Oxford Advanced Learner Dictionary of Current English* (Walton: Oxford University Press, 1989), 1032.
- Ahmad Syafi'i Mufid, "Peta Gerakan Radikalisme di Indonesia" (Membangun Kesadaran dan Strategi Menghadapi Radikalisasi Agama, Palu, Mei 2012), 3.
- Karwadi Karwadi, "Deradikalisasi Pemahaman Ajaran Islam," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 14, no. 1
- Dalam kamus bahasa: Lisanul Arab, Mukhtaraarush Shihaah dan al-Qaamuusul Muhiith: (bab: Jama'a).
- Dikutip dari <http://pustakaimamsyafii.com/definisi-ahlus-sunnah-wal-jamaah.html> yang diakses pada tanggal 15 Juni 2019 jam 16.12 Waktu Indonesia Tengah
- Dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran, ayat 103 dan 105
- Dalam (Shahih Sunan Abi Dawud oleh Imam al-Albani). (HR. Abu Dawud no. 4597, Ahmat (IV/102), al-Hakim (I/128), ad-Darimi (II/241). Dishahihkan oleh al-Hakim dan disepakati oleh Imam adz- Dzahabi dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Dishahihkan pula oleh Syaikh al-Albani. Lihat Silsilatul Ahadadiitsish Shahiihah no. 203.204).(1 Mei 2014): 142, doi:10.21154/al-tahrir.v14i1.71.
- Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Post- Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996), hal. 113.
- Mukhibat, "Re-Edukasi dan Re-Motivasi terhadap Mukhibat, "Re-Edukasi dan Re-Motivasi terhadap Pelaku Radikalisme dan Terorisme," hal. 23.
- Azyumardi Azra, "Agama dan Otentisitas Islam," *Republika*, Oktober 2002. Fenomena radikalisme agama tidak hanya milik Islam, akan tetapi miliki semua agama. Dalam bukunya "Kontek Berteologi di Indonesia Pengalaman Islam", pada halaman 136-138 Azra mengungkapkan bahwa kesamaan ideology yang diusung oleh kelompok-kelompok radikal seperti memiliki pemahaman yang rigid dan kaku terhadap doktrin-doktrin keagamaan dan anti penggunaan ilmu pengetahuan modern terhadap kitab suci dalam rangka mengkontektualkan ajaran agama dengan perkembangan modern. Kontektualisasi ajaran agama pada prinsipnya dalam rangka penyelerasan ajaran agama dimaksud dengan dinamika modern sehingga agama tersebut tidak ditinggalkan oleh pemangkunya.
- John L. Esposito, (Terj.), *Islam warna-warni: Ragam Ekspresi Menuju "Jalan Lurus" (al shirat- al Mutstaqim)*. Jakarta, Paramadina, 2004, hlm. 95-97
- Dikutip dari HR Ahmad, dalam Musnadnya, dan dishahihkan oleh Imam al-Albani dalam kitab Sunnah karya Ibnu Abi „Ashim). (HR. At-Tirmidzi no. 2165, Ahmad (I/18), lafazh ini milik at-Tirmidzi. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam kitab as-Sunnah karya Ibnu Abi „Ashim dan bersamanya kitab Zhilaalul Jannah fi Takhrij as-Sunnah no. 88).

Diriwayatkan oleh al-Lalika-i dalam kitabnya, Syarah Ushul I'tiqaad Ahlis Sunnah walJama'ah). (Syarah Ushuulil I'tiqaad karya al-Lalika-i no. 160 dan al-Baa'its „alaa Inkaaril Bida' wal Hawaadits hal. 91-92, tahqiq oleh Syaikh Masyhur bin Hasan Salman).

Mahir Manshur Abdurraziq, Mukjizat Shalat Berjama'ah, terj. Abdul Majid Alimin, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007), hlm. 66.

Said bin Ali bin Wahf Al-Qahthani, Lebih Berkah Dengan Sholat Berjamaah, terj. Muhammad bin Ibrahim, (Solo: Qaula, 2008), hlm. 19.

As Hornby, *Oxford Advanve Learner Dictionary of Current English* (Walton: Oxford University Press, 1989), 1032.

Ahmad Syafi'i Mufid, "Peta Gerakan Radikalisme di Indonesia" (Membangun Kesadaran dan Strategi MenghadapiRadikalisasi Agama, Palu, Mei 2012), 3.

Karwadi Karwadi, "Deradikalisasi Pemahaman Ajaran Islam," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 14, no. 1